

# PENENTUAN LEADING SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

Sudarti<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi, IESP, Universitas Muhammadiyah Malang  
Alamat Korespondensi : Perum Pondok Bestari Indah E1/157 Landungsari Dau Malang  
Telpon :0341-466634, Hp: 081333166206 E-mail: sudarti@umm.ac.id

## ABSTRACT

This study aimed to find out how big the contribution of primary sector, secondary and tertiary to the GDP in each regency / city in East Java, and which became the leading sector in each district / city in East Java. How the regional economic growth in each district / city in East Java; how structure and pattern of economic pertumbuhan between districts and municipalities in East Java.

The conclusion of this research are each regency / city in East Java has the potential leading sectors in accordance with their respective regions. Sectors are said key sectors for growth in these sectors is higher than the same sector growth in East Java as the reference area. Based on the results of the analysis indicate that the economic potential of Blitar City is an area that most sub-sectors of the economy has the potential or to the typology "of fast-growing fast forward". Blitar city has 9 (nine) sub-sector with a typology of "fast-growing fast forward", the nine sub-sectors include: 1) animal husbandry; 2) railway transport; 3) services allied to transport; 4) post and telecommunications; 5) the bank; 6) corporate services; 7) general government; 8) private; and 9) social services.

Keywords: Leading Sectors Pembnagunan

## PENDAHULUAN

Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sector. Seiring diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan wewenang pada pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberlakuan otonomi daerah juga berarti Pemerintah daerah harus memiliki rencana ekonomi daerah yang baik demi kesejahteraan penduduknya.

Dalam upaya pembangunan daerah, maka akan dimanfaatkan aspek-aspek yang secara ekonomi berpotensi untuk dikembangkan. Secara harfiah, potensi ekonomi dalam kerangka pembangunan daerah dapat diartikan sebagai kesanggupan kekuatan dan kemampuan di bidang ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah untuk membangun daerahnya masing-masing. Potensi ekonomi dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, letak geografis daerah yang dekat

dengan sarana dan prsarana serta pendukung lainnya.

Penggalian segala potensi yang ada terasa sangat penting dalam rangka mengembangkan kemandirian masing-masing kabupaten/kota. Kemandirian dapat diartikan dengan semakin berkurangnya ketergantungan kepada pemerintah di atasnya, daerah lain maupun terhadap negara lain.

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan yang serius. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang cepat, sementara daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami pertumbuhan yang sama karena disebabkan oleh sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan penanaman modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang lebih memiliki fasilitas seperti sarana perhubungan, jaringan listrik, telekomunikasi, perbankan, asuransi juga tenaga yang trampil. Disamping itu kesenjangan daerah juga disebabkan oleh adanya

ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Adanya Undang-undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah, akan membawa angin segar bagi daerah untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi ekonomi daerah secara mandiri sehingga ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sector secara bertahap dapat diperkecil.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebagai salah satu indicator pembangunan diukur dengan produk Domestik regional bruto (PDRB). PDRB dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Penentuan leading sector ekonomi (potensi ekonomi daerah) dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi masing-masing sector di daerah tersebut.

Perbedaan tingkat pertumbuhan dan pembangunan wilayah akan membawa dampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan antar Kabupaten/Kota, yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan regional antar kabupaten/ Kota semakin besar.

Pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak merata, justru akan menghambat pertumbuhan wilayah yang relatif tertinggal akan semakin tertinggal.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sector primer, sekunder dan tersier terhadap PDRB pada setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur; dan yang menjadi leading sector pada setiap Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Bagaimana pertumbuhan ekonomi regional pada setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur; bagaimana pola dan struktur pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

## METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, Jenis data yang digunakan adalah data sekunder sifatnya time series tahun 2003 - 2004. Sumber data diperoleh dari Biro Pusat Statistik

Jawa Timur, Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah :

### Location Quotient (LQ)

Teknik analisis ini digunakan untuk menentukan kategori suatu sektor termasuk dalam sektor basis atau bukan basis. Formulasi dari teknik analisis tersebut adalah: (Iwan Jaya Azis, 1993)

$$LQ_i^J = \frac{VA_i^J / VA_i^I}{PDRB^J / PDRB^I}$$

Keterangan :

$LQ_i^J$  : Location Quotient sektor i di daerah J

$VA_i^J$  : Nilai tambah sektor i di daerah J

$VA_i^I$  : Nilai tambah sektor i di tingkat kabupaten

$PDRB^J$  : Produk Domestik Regional Bruto di daerah J

$PDRB^I$  : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten

Dari hasil perhitungan yang diperoleh, dapat diartikan dalam dua kategori, yaitu:

1. Bila nilai LQ lebih kecil atau sama dengan 1, menunjukkan bahwa sektor tersebut bukan sektor basis.
2. Bila nilai LQ lebih besar dari 1, menunjukkan bahwa sektor tersebut adalah sektor basis.

### Tipologi Klassen

Alat analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah. Sjarizal (1997) menjelaskan bahwa dengan menggunakan alat analisis ini dapat diperoleh empat klasifikasi pertumbuhan daerah yaitu: daerah pertumbuhan cepat (rapid growth region), daerah tertekan (retarded region), daerah sedang tumbuh (growing region), dan daerah relatif tertinggal (relatively backward region).

Kuncoro (1997) menggunakan alat analisis ini untuk menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi

27 propinsi di Indonesia. Dengan membandingkan ratio pendapatan perkapita dan ratio pertumbuhan. Dalam penelitiannya perekonomian propinsi di Indonesia diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok. 1) Low growth, high income, 2) High growth, high

income, 3) High growth, low income dan 4) Low growth, low income.

Formulasi alat analisis ini sebagai berikut:

**Tabel. 1 Matrik Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi Klassen**

<b>PDRB perkapita (y)</b> <b>Laju Pertumbuhan (r)</b>	$y_i < y$	$y_i > y$
	$r_i > r$	<b>Daerah berkembang Cepat</b>
$r_i < r$	<b>Daerah relatif Tertinggal</b>	<b>Daerah maju tapi Tertekan</b>

Sumber : Sjafrizal, (1997)

Keterangan :

$r_i$  = laju pertumbuhan PDRB Kabupaten i  
 $r$  = laju pertumbuhan total PDRB Propinsi  
 $y_i$  = pendapatan perkapita Kabupaten i  
 $y$  = pendapatan perkapita Propinsi

(a) Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPS) dan  
 (b) Rasio Pertumbuhan Wilayah Refrensi (RPR)

Formulasi dari RPS dan RPR adalah sebagai berikut :

**Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)**

Analisa Model Rasio Pertumbuhan (MPR) dilakukan untuk melihat diskripsi kegiatan ekonomi, terutama struktur ekonomi Madura maupun Propinsi Jawa Timur, yang lebih lebih menekankan pada criteria pertumbuhan. Alat analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi sektorsektor unggulan dari sisi pertumbuhan sehingga diharapkan dapat teridentifikasi sektor unggulan, baik sisi kontribusi (LQ) maupun dari sisi pertumbuhan. MPR adalah kegiatan membandingkan pertumbuhan suatu kegiatan baik dalam skala yang lebih kecil maupun dalam skala yang lebih luas. Terdapat dua rasio pertumbuhan dalam analisis tersebut, yaitu

$$RPS = \frac{\Delta E_{ij} / E_{iR(t)}}{\Delta E_{iR} / E_{iR(t)}}$$

$$RPR = \frac{\Delta E_{iR} / E_{iR(t)}}{\Delta E_R / E_{R(t)}}$$

$\Delta E_{ij}$  : Perubahan pendapatan kegiatan i di kabupaten Madura pada periode waktu t dan t + 1

$\Delta E_{iR}$  : Perubahan PDRB di Madura

$\Delta E_{iR}$  : Perubahan pendapatan kegiatan i di Madura

$E_{iR(t)}$  : Perubahan pendapatan kegiatan i di Kabupaten Madura

$E_R$  : PDRB wilayah Madura

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Besar kontribusi sector primer, sekunder dan tersier terhadap PDRB pada setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Kontribusi sektor dan sub sektor ekonomi masing-masing kabupaten/kota yang ada di wilayah Propinsi Jawa Timur akan dianalisis dengan alat analisis Location Quotient (LQ). Analisis LQ merupakan suatu alat analisis untuk menunjukkan

basis ekonomi wilayah terutama dari kriteria kontribusi. Variabel yang digunakan dalam perhitungan basis ekonomi tersebut adalah PDRB wilayah dari suatu kegiatan yang dititik beratkan pada kegiatan dalam struktur ekonomi wilayah.

Dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ) dapat dilihat kegiatan basis ekonomi tiap-tiap kabupaten/kota yang ada di wilayah Propinsi Jawa Timur, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Klasifikasi Sektor dan Sub Sektor Berdasarkan Analisis Location Quotient Tiap-Tiap Kabupaten/Kota Di Wilayah Propinsi Jawa Timur**

No	Sektor/Sub-sektor	Kabupaten/Kota																		
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Pertanian	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	1.2. Tanaman Perkebunan	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	1.3. Peternakan	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	1.4. Kehutanan	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	1.5. Perikanan	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
II	Pertambangan & Penggalian	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	2.1. Pertambangan Migas	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	2.2. Pertambangan Non Migas	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	2.3. Penggalian	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
III	Industri Pengolahan	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	3.1. Makanan, minuman, dan tembakau	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	3.2. Tekstil, barang dari kulit, & alas kaki	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	3.3. Barang dari kayu & hasil hutan lainnya	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	3.4. Kertas dan barang cetakan	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	3.5. Pupuk kimia dan barang dari karet	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	3.6. Semen & barang galian bukan logam	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	3.7. Logam dasar dan besi dan baja	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	3.8. alat angkutan, mesin dan peralatan	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	3.9. Barang lainnya	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
IV	Listrik & Air Bersih	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	4.1. Listrik	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	4.2. Gas Kota	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	4.3. Air Bersih	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
V	Bangunan/Konstruksi	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB

No	Sektor/Sub-sektor	Kabupaten/Kota																		
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
VI	Perdagangan, Hotel & Restoran	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	6.1. Perdagangan	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	6.2. Hotel	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	6.3. Restoran	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
VII	Pengangkutan & Komunikasi	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	a. Angkutan	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	Ta.1. Angkutan rel	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	Ta.2. Angkutan jalan raya	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	Ta.3. Angkutan laut	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	Ta.4. Angkutan penyebrangan	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	Ta.5. Angkutan Udara	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	Ta.6. Jasa Penunjang Angkutan	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	b. Komunikasi	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	Tb.1. Pos dan telekomunikasi	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	Tb.2. Jasa Penunjang komunikasi	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
VIII	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perus.	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	8.1. Bank	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	8.3. Jasa Penunjang Keuangan	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	8.4. Sewa Bangunan	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	8.5. Jasa Perumahan	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
IX	Jasa-Jasa	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	a. Pemerintahan Umum	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	b. Swasta	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	Rb.1. Jasa sosial kemasyarakatan	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	Rb.2. Jasa hiburan dan kebudayaan	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	Rb.3. Jasa perawatan dan rumah tangga	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB

No	Sektor/Sub-sektor	Kabupaten/Kota																		
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
I	Pertanian	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	1.2. Tanaman Perkebunan	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	1.3. Perikanan	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	1.4. Kehutanan	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	1.5. Perikanan	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
II	Pertambangan & Penggalian	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	2.1. Pertambangan Migas	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	2.2. Pertambangan Non Migas	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	2.3. Penggalian	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
III	Industri Pengolahan	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	3.1. Makanan, minuman, dan tembakau	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	3.2. Tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	3.3. Barang dari kayu & hasil hutan lainnya	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	3.4. Kertas dan barang cetakan	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	3.5. Pupuk kimia dan barang dari karet	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	3.6. Semen & barang galian bukan logam	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	3.7. Logam dasar dan besi dan baja	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	3.8. alat angkutan, mesin dan peralatan	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	3.9. Barang lainnya	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
IV	Listrik & Air Bersih	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	4.1. Listrik	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	4.2. Gas Kota	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	4.3. Air Bersih	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
V	Bangunan/Konstruksi	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
VI	Perdagangan, Hotel & Restoran	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	6.1. Perdagangan	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08

No	Sektor/Sub-sektor	Kabupaten/Kota																		
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	6.2. Hotel	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	6.3. Restoran	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
VII	Pengangkutan & Komunikasi	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	a. Angkutan	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	7a.1. Angkutan rel	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	7a.2. Angkutan jalan raya	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	7a.3. Angkutan laut	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	7a.4. Angkutan penyebrangan	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	7a.5. Angkutan Udara	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	7a.6. Jasa Penunjang Angkutan	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	b. Komunikasi	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	7b.1. Pos dan telekomunikasi	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	7b.2. Jasa Penunjang komunikasi	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
VIII	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perus.	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	8.1. Bank	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	8.3. Jasa Penunjang Keuangan	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	8.4. Sewa Bangunan	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	8.5. Jasa Persewaan	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
IX	Jasa-Jasa	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	a. Peminoritan Umum	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	b. Swasta	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	9b.1. Jasa sosial kemasyarakatan	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	9b.2. Jasa hiburan dan kebudayaan	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
	9b.3. Jasa perancangan dan rumah tangga	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08

Keterangan:

- 01 = Kab. Pacitan
- 02 = Kab. Ponorogo
- 03 = Kab. Trenggalek
- 04 = Kab. Tulungagung
- 05 = Kab. Blitar
- 06 = Kab. Kediri
- 11 = Kab. Bondowoso
- 12 = Kab. Situbondo
- 13 = Kab. Probolinggo
- 14 = Kab. Pasuruan
- 15 = Kab. Sidoarjo
- 16 = Kab. Mojokerto

- 07 = Kab. Malang
- 08 = Kab. Lumajang
- 09 = Kab. Jember
- 10 = Kab. Banyuwangi
- 21 = Kab. Ngawi
- 22 = Kab. Bojonegoro
- 23 = Kab. Tuban
- 17 = Kab. Jombang
- 18 = Kab. Nganjuk
- 19 = Kab. Madiun
- 20 = Kab. Magetan
- 31 = Kota Blitar
- 32 = Kota Malang
- 33 = Kota Probolinggo

- 24 = Kab. Lamongan    34 = Kota Pasuruan  
 25 = Kab. Gresik      35 = Kota Mojokerto  
 26 = Kab. Bangkalan   36 = Kota Madiun  
 27 = Kab. Sampang     37 = Kota Surabaya  
 28 = Kab. Pamekasan   38 = Kota Batu  
 29 = Kab. Sumenep  
 30 = Kota Kediri

Nilai Sektor Basis (SB) pada tabel di atas menunjukkan bahwa, sektor tersebut memiliki nilai LQ lebih besar dari 1 (satu), artinya sektor tersebut bisa memenuhi kebutuhan atau permintaan di kabupaten/kota yang bersangkutan atau menunjukkan bahwa sektor tersebut menjadi sektor unggulan atau leading sektor di daerah tersebut, sedangkan nilai Bukan Sektor Basis (BSB) menunjukkan pengertian yang sebaliknya.

## b. Pertumbuhan Ekonomi Regional Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi masing-masing kabupaten/kota yang ada di wilayah Propinsi Jawa Timur akan dianalisis dengan alat analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Analisis MRP dilakukan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi terutama struktur kegiatan ekonomi masing-masing kabupaten/kota yang menekankan pada kriteria pertumbuhan baik secara eksternal (propinsi) maupun internal (kabupaten/kota). Berdasarkan hasil analisis Model Rasio Tertumbuhan (MRP) diperoleh nilai masing-masing sektor ekonomi di tiap kabupaten/kota yang ada di wilayah Propinsi Jawa Timur sebagai berikut:

**Tabel 2 Klasifikasi Sektor dan Sub Sektor Berdasarkan Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Tiap-Tiap Kabupaten/Kota Di Wilayah Propinsi Jawa Timur**

No	Sektor/Sub-sektor	Kabupaten/Kota																		
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Pertanian	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
	1.2. Tanaman Perkebunan	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
	1.3. Peternakan	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	1.4. Kehutanan	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	x	+	-	-	+
	1.5. Perikanan	+	-	+	+	-	-	+	+	+	-	+	-	+	-	-	+	+	+	+
II	Pertambangan & Penggalian	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-
	2.1. Pertambangan Migas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2.2. Pertambangan Non Migas	x	x	x	x	-	x	x	x	x	+	x	x	x	-	x	x	x	x	x
	2.3. Penggalian	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-
III	Industri Pengolahan	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-	+	+
	3.1. Makanan, minuman, dan tembakau	-	+	+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	+
	3.2. Tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki	-	+	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
	3.3. Barang dari kayu & hasil hutan lainnya	-	+	+	+	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+
	3.4. Kertas dan barang cetakan	-	+	-	+	+	-	+	-	+	-	-	+	-	+	-	-	+	-	+
	3.5. Pupuk kimia dan barang dari karet	x	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	-	+	+	x	+
	3.6. Semen & barang galian bukan logam	-	+	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	-	-
	3.7. Logam dasar dan besi dan biaya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	+	-	+	+	x	x
	3.8. alat angkutan, mesin dan peralatan	-	+	-	+	-	-	+	-	+	-	-	x	+	-	-	-	-	-	-
	3.9. Barang lainnya	-	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	-	+	+	-	-	+	+
IV	Listrik & Air Bersih	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+	-
	4.1. Listrik	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+	-
	4.2. Gas Kota	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4.3. Air Bersih	+	+	+	-	+	-	-	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-

No	Sektor/Sub-sektor	Kabupaten/Kota																		
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
V	Bangunan/Konstruksi	+	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
VI	Perdagangan, Hotel & Restoran	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
	6.1. Perdagangan	-	-	+	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
	6.2. Hotel	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+
	6.3. Restoran	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	-	+
VII	Pengangkutan & Komunikasi	-	+	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
	a. Angkutan	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+
	7a.1. Angkutan rel	X	X	X	+	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	X	+	-	-
	7a.2. Angkutan jalan raya	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+
	7a.3. Angkutan laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	+	-	X	X	X	X	X	X
	7a.4. Angkutan penyebrangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	+	X	+	X	X	X	X	X	X	X
	7a.5. Angkutan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	+	X	X	X	X
	7a.6. Jasa Penunjang Angkutan	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-
	b. Komunikasi	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-	-
	7b.1. Pos dan telekomunikasi	+	+	+	+	+	-	+	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-
	7b.2. Jasa Penunjang komunikasi	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-
VIII	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	-
	8.1. Bank	-	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-
	8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+
	8.3. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.4. Sewa Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
	8.5. Jasa Perusahaan	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+
IX	Jasa-Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
	a. Pemerintahan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
	b. Swasta	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	-	+	+
	9b.1. Jasa sosial masyarakat	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+	-	+	+
	9b.2. Jasa hiburan dan kebudayaan	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+
	9b.3. Jasa perorangan dan rumah tangga	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-

No	Sektor/Sub-sektor	Kabupaten/Kota																			
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
I	Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	
	1.2. Tanaman Perkebunan	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	+	
	1.3. Peternakan	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	+	
	1.4. Kehutanan	+	+	+	-	-	X	+	-	X	+	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
	1.5. Perikanan	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	+	-	+	-	-	-	
II	Pertambangan & Penggalian	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	X	-	-	+	
	2.1. Pertambangan Migas	X	X	X	-	X	X	+	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2.2. Pertambangan Non Migas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2.3. Penggalian	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	X	-	-	+	
III	Industri Pengolahan	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.1. Makanan, minuman, dan tembakau	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	
	3.2. Tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki	-	+	-	+	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3. Barang dari kayu & hasil hutan lainnya	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	+	
	3.4. Kertas dan barang cetakan	+	-	-	+	+	+	-	+	X	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	
	3.5. Pupuk kimia dan barang dari karet	X	-	-	+	+	+	+	+	X	-	+	+	-	-	-	+	-	-	+	
	3.6. Semen & barang galian bukan logam	-	+	-	+	-	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	X	-	-	+	
	3.7. Logam dasar dan besi dan biaya	X	-	X	X	X	+	+	X	X	-	X	+	X	X	-	X	X	-	X	
	3.8. alat angkutan, mesin dan peralatan	-	X	-	-	X	+	-	-	-	-	-	X	-	+	-	X	-	-	+	
	3.9. Barang lainnya	-	-	-	X	-	+	-	+	-	-	X	+	-	+	-	+	-	-	+	
IV	Listrik & Air Bersih	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	
	4.1. Listrik	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	-	
	4.2. Gas Kota	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	4.3. Air Bersih	+	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	
V	Bangunan/Konstruksi	-	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	+
VI	Perdagangan, Hotel & Restoran	+	-	-	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	
	6.1. Perdagangan	+	+	-	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	
	6.2. Hotel	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	
	6.3. Restoran	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	

No	Sektor/Sub-sektor	Kabupaten/Kota																		
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
VII	Pengangkutan & Komunikasi	-	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+
	a. Angkutan	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
	7a.1. Angkutan rel	+	-	+	X	-	+	X	X	X	X	-	+	-	-	-	-	-	-	X
	7a.2. Angkutan jalan raya	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
	7a.3. Angkutan laut	X	X	X	X	X	+	+	-	+	-	X	X	X	X	-	X	X	+	X
	7a.4. Angkutan penyebrangan	X	X	X	X	X	+	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	+	X
	7a.5. Angkutan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	7a.6. Jasa Penunjang Angkutan	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	+
	b. Komunikasi	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
	7b.1. Pos dan telekomunikasi	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
	7b.2. Jasa Penunjang komunikasi	+	+	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
VIII	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perus.	-	-	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	+	+	
	8.1. Bank	+	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+
	8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	+	+	-	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
	8.3. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.4. Sewa Bangunan	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	+	-	+	+	-	+	+
	8.5. Jasa Perusahaan	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+
IX	Jasa-Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
	a. Pemerintahan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+
	b. Swasta	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+
	9b.1. Jasa sosial masyarakat	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+
	9b.2. Jasa hiburan dan kebudayaan	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-	+
	9b.3. Jasa perorangan dan rumah tangga	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-

- |                       |                       |                      |                       |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 01 = Kab. Pacitan     | 11 = Kab. Bondowoso   | 21 = Kab. Ngawi      | 31 = Kota Blitar      |
| 02 = Kab. Ponorogo    | 12 = Kab. Situbondo   | 22 = Kab. Bojonegoro | 32 = Kota Malang      |
| 03 = Kab. Trenggalek  | 13 = Kab. Probolinggo | 23 = Kab. Tuban      | 33 = Kota Probolinggo |
| 04 = Kab. Tulungagung | 14 = Kab. Pasuruan    | 24 = Kab. Lamongan   | 34 = Kota Pasuruan    |
| 05 = Kab. Blitar      | 15 = Kab. Sidoarjo    | 25 = Kab. Gresik     | 35 = Kota Mojokerto   |
| 06 = Kab. Kediri      | 16 = Kab. Mojokerto   | 26 = Kab. Bangkalan  | 36 = Kota Madiun      |
| 07 = Kab. Malang      | 17 = Kab. Jombang     | 27 = Kab. Sampang    | 37 = Kota Surabaya    |
| 08 = Kab. Lumajang    | 18 = Kab. Nganjuk     | 28 = Kab. Pamekasan  | 38 = Kota Batu        |
| 09 = Kab. Jember      | 19 = Kab. Madiun      | 29 = Kab. Sumenep    |                       |
| 10 = Kab. Banyuwangi  | 20 = Kab. Magetan     | 30 = Kota Kediri     |                       |

### Pola dan struktur pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur.



**Tabel 4. Tipologi Sektor dan Sub Sektor Berdasarkan Analisis Overlay Location Quotient (LQ) dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Tiap-Tiap Kabupaten/Kota Di Wilayah Propinsi Jawa Timur**

No	Sektor/Sub-sektor	Kabupaten/Kota																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Pertanian	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CTCM	CTCM	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	RT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CTCM	CMTT	CMTT	CTCM	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	RT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	
	1.2. Tanaman Perkebunan	CTCM	RT	CMTT	RT	CMTT	CMTT	CTCM	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	RT	RT	CTCM	CMTT	CMTT	RT	
	1.3. Peternakan	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	RT	CMTT	CMTT	CTCM	CMTT	
	1.4. Kehutanan	RT	CTCM	CMTT	CTCM	CMTT	CMTT	CTCM	RT	CMTT	CMTT	CMTT	RT	CMTT	RT	-	BC	CMTT	CTCM	
	1.5. Perikanan	BC	RT	CTCM	CMTT	RT	RT	BC	BC	BC	CMTT	BC	CMTT	CTCM	CMTT	BC	BC	BC	BC	
II	Pertambangan & Penggalian	CMTT	RT	BC	BC	RT	BC	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	BC	BC	RT	RT	RT	
	2.1. Pertambangan Migas	-	-	-	CTCM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2. Pertambangan Non Migas	-	-	-	-	RT	-	-	-	-	BC	-	-	-	RT	-	-	-	-	
	2.3. Penggalian	CMTT	RT	BC	BC	BC	RT	BC	RT	RT	RT	RT	RT	RT	BC	BC	RT	RT	RT	
III	Industri Pengolahan	RT	BC	BC	BC	BC	RT	BC	RT	BC	RT	BC	RT	RT	CTCM	CMTT	CMTT	RT	BC	
	3.1. Makanan, minuman, dan tembakau	RT	BC	BC	BC	BC	RT	BC	CMTT	RT	RT	BC	RT	RT	CTCM	CMTT	CTCM	RT	BC	
	3.2. Tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki	RT	BC	BC	BC	RT	RT	CTCM	RT	BC	RT	RT	RT	BC	RT	CMTT	RT	CMTT	BC	
	3.3. Barang dari kayu dan hasil hutan lainnya	RT	BC	CTCM	RT	RT	RT	BC	RT	BC	RT	BC	BC	BC	CMTT	CMTT	RT	RT	CTCM	
	3.4. Kertas dan barang cetakan	RT	BC	RT	RT	BC	CMTT	BC	RT	BC	RT	RT	BC	RT	BC	CMTT	CMTT	BC	RT	
	3.5. Pupuk kimia dan barang dari karet	-	BC	CMTT	BC	RT	RT	RT	RT	BC	RT	BC	RT	BC	BC	CMTT	BC	BC	-	
	3.6. Semen dan barang galian bukan logam	RT	BC	BC	BC	BC	RT	CTCM	RT	RT	RT	RT	BC	RT	BC	CMTT	BC	BC	CMTT	
	3.7. Logam dasar dan besi dan biaya	-	-	-	BC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BC	CMTT	BC	BC	-	
	3.8. alat angkutan, mesin dan peralatan	RT	BC	RT	RT	RT	RT	BC	RT	BC	RT	RT	-	BC	CMTT	CMTT	RT	RT	RT	
	3.9. Barang lainnya	RT	BC	RT	RT	RT	RT	BC	CMTT	BC	RT	BC	RT	RT	CTCM	CTCM	RT	CMTT	CTCM	
IV	Listrik & Air Bersih	BC	BC	BC	BC	BC	RT	BC	BC	BC	RT	BC	RT	BC	BC	BC	RT	BC	BC	
	4.3. Air Bersih	BC	BC	BC	BC	BC	RT	RT	BC	BC	RT	RT	RT	BC	BC	BC	RT	BC	RT	
V	Bangunan/Konstruksi	CTCM	CTCM	CTCM	CTCM	BC	RT	BC	CMTT	CTCM	RT	RT	BC	CMTT	BC	RT	BC	RT	CMTT	

No	Sektor/Sub-sektor	Kabupaten/Kota																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
VI	Perdagangan, Hotel & Restoran	RT	CMTT	BC	RT	RT	RT	RT	RT	BC	BC	CMTT	BC	BC	CTCM	BC	CTCM	CTCM	BC	
	6.1. Perdagangan	RT	RT	BC	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	BC	RT	CTCM	BC	CMTT	BC	BC	CTCM	BC	CTCM	CTCM	
	6.2. Hotel	RT	RT	RT	RT	BC	RT	RT	RT	BC	RT	BC	RT	BC	CTCM	RT	BC	BC	RT	
	6.3. Restoran	RT	CMTT	CMTT	BC	BC	RT	RT	RT	RT	RT	BC	RT	BC	RT	BC	BC	BC	RT	
VII	Pengangkutan & Komunikasi	RT	BC	RT	CTCM	BC	RT	RT	RT	BC	RT	RT	RT	BC	RT	BC	RT	RT	RT	
	a. Angkutan	CMTT	CTCM	RT	CTCM	BC	RT	RT	RT	RT	RT	RT	CMTT	RT	RT	CTCM	RT	CMTT	RT	
	7a.1. Angkutan rel	-	-	-	-	RT	RT	RT	RT	CMTT	CMTT	-	-	-	RT	RT	-	CTCM	CMTT	
	7a.2. Angkutan jalan raya	CMTT	CTCM	CMTT	CMTT	BC	RT	CMTT	CMTT	CMTT	RT	RT	CMTT	RT	RT	BC	CMTT	CMTT	RT	
	7a.3. Angkutan laut	-	-	-	CTCM	-	-	-	-	-	CMTT	-	CTCM	RT	-	-	-	-	-	
	7a.4. Angkutan penyebrangan	-	-	-	CMTT	-	-	-	-	-	CTCM	-	CTCM	-	-	-	-	-	-	
	7a.5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7a.6. Jasa Penunjang Angkutan	RT	BC	RT	RT	RT	RT	RT	RT	BC	BC	BC	RT	RT	RT	RT	BC	RT	RT	
	b. Komunikasi	BC	BC	BC	BC	BC	RT	BC	RT	BC	BC	RT	RT	BC	RT	BC	BC	BC	RT	
	7b.1. Pos dan telekomunikasi	BC	BC	BC	BC	BC	RT	BC	RT	BC	BC	RT	RT	BC	BC	BC	BC	BC	RT	
	7b.2. Jasa Penunjang komunikasi	RT	BC	BC	BC	RT	RT	RT	RT	BC	BC	BC	RT	BC	RT	BC	BC	RT	RT	
VIII	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perus.	CMTT	RT	RT	BC	CMTT	RT	RT	RT	RT	CMTT	CTCM	RT	BC	RT	BC	BC	BC	RT	
	8.1. Bank	CMTT	BC	RT	BC	RT	CTCM	BC	RT	CMTT	RT	RT	RT	BC	BC	BC	CTCM	BC	RT	
	8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	CMTT	RT	CMTT	BC	CMTT	CMTT	CMTT	RT	CMTT	CMTT	BC	BC	CTCM	RT	BC	BC	CTCM	RT	
	8.3. Jasa Penunjang Keuangan	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	BC	RT	BC	BC	BC	RT	BC	RT	RT	
	8.4. Sewa Bangunan	CMTT	CMTT	RT	BC	RT	CMTT	RT	RT	RT	RT	CMTT	CMTT	CTCM	BC	RT	RT	CTCM	CTCM	
	8.5. Jasa Perusahaan	RT	RT	RT	CTCM	CTCM	RT	RT	RT	RT	CMTT	RT	RT	RT	BC	RT	RT	RT	RT	
IX	Jasa-Jasa	CMTT	RT	CMTT	RT	RT	RT	CMTT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	BC	RT	RT	RT	CMTT	
	a. Pemerintahan Umum	CTCM	CMTT	CMTT	CMTT	RT	CMTT	RT	CMTT	CTCM	RT	CTCM	RT	BC	RT	BC	BC	CMTT	CTCM	
	b. Swasta	RT	RT	RT	CTCM	CMTT	RT	CMTT	RT	RT	RT	BC	RT	BC	RT	BC	RT	BC	BC	
	9b.1. Jasa sosial kemasyarakatan	BC	RT	RT	RT	BC	CMTT	CMTT	RT	CTCM	RT	CTCM	RT	BC	BC	CTCM	CTCM	RT	BC	

9b.2. Jasa hiburan dan kebudayaan	CMTT	RT	CMTT	CMTT	RT	CMTT	RT	BC	CTCM	CMTT	BC	BC	BC	RT	BC	BC	CTCM	CTCM	RT
9b.3. Jasa perorangan dan rumah tangga	RT	RT	RT	BC	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT

No	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota																	
		Sektor/Sub-sektor	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
I	Pertanian	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	RT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	RT	RT	RT	BC	RT	RT	RT	RT
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	RT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	RT	RT	RT	RT	RT	BC	RT	RT
	1.2. Tanaman Perkebunan	CMTT	BC	BC	RT	RT	RT	RT	CMTT	CMTT	CMTT	RT	-	RT	RT	RT	RT	RT	-
	1.3. Peternakan	CTCM	CTCM	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	RT	CTCM	RT	BC	CMTT	RT	RT	RT
	1.4. Kehutanan	CTCM	CTCM	CTCM	CMTT	RT	-	CTCM	CMTT	-	CTCM	-	-	-	-	-	-	-	RT
	1.5. Perikanan	RT	RT	BC	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	CTCM	CMTT	CMTT	BC	BC	RT	CTCM	RT	BC	RT	RT
II	Pertambangan & Penggalian	RT	RT	BC	CMTT	RT	RT	BC	RT	BC	CMTT	RT	RT	RT	RT	RT	-	RT	RT
	2.1. Pertambangan Migas	-	-	-	CMTT	-	-	CTCM	-	-	CMTT	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2. Pertambangan Non Migas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3. Penggalian	RT	RT	BC	RT	RT	RT	BC	CMTT	BC	RT	RT	RT	RT	RT	RT	-	RT	RT
III	Industri Pengolahan	BC	RT	RT	BC	BC	CTCM	BC	RT	RT	RT	CMTT	RT	CMTT	RT	RT	RT	CMTT	CMTT
	3.1. Makanan, minuman, dan tembakau	BC	RT	RT	RT	BC	BC	BC	RT	RT	RT	CMTT	RT	CTCM	BC	BC	RT	RT	CMTT
	3.2. Tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki	RT	BC	RT	BC	RT	CTCM	BC	RT	RT	RT	BC	RT	RT	CMTT	RT	CMTT	RT	RT
	3.3. Barang dari kayu dan hasil hutan lainnya	BC	RT	CMTT	RT	CTCM	CTCM	RT	RT	RT	RT	CMTT	RT	CTCM	CTCM	RT	BC	RT	BC
	3.4. Kertas dan barang cetakan	BC	RT	RT	BC	BC	BC	RT	BC	-	RT	RT	BC	RT	RT	BC	RT	RT	BC
	3.5. Pupuk kimia dan barang dari karet	-	RT	RT	BC	BC	CTCM	BC	BC	-	RT	BC	BC	RT	CMTT	RT	BC	CMTT	RT
	3.6. Semen dan barang galian bukan logam	RT	BC	RT	CTCM	RT	CTCM	BC	BC	RT	RT	BC	BC	BC	BC	RT	-	RT	CMTT
	3.7. Logam dasar dan besi dan biaya	-	RT	-	-	-	CTCM	BC	-	-	RT	-	BC	-	-	RT	-	-	CMTT
	3.8. alat angkutan, mesin dan peralatan	RT	#DIV/0!	RT	RT	-	CTCM	RT	RT	RT	RT	RT	-	RT	BC	CMTT	-	CMTT	CMTT
	3.9. Barang lainnya	RT	RT	RT	-	RT	BC	RT	BC	RT	RT	-	BC	RT	BC	RT	BC	RT	CMTT
IV	Listrik & Air Bersih	BC	RT	BC	BC	RT	CTCM	BC	BC	RT	BC	BC	BC	BC	RT	RT	CMTT	BC	BC
	4.1. Listrik	BC	RT	BC	CTCM	RT	CTCM	BC	BC	RT	BC	BC	BC	BC	RT	RT	CMTT	BC	BC
	4.2. Gas Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CTCM
	4.3. Air Bersih	BC	RT	BC	RT	BC	BC	BC	RT	RT	RT	RT	RT	RT	BC	CTCM	RT	BC	CTCM
V	Bangunan/Konstruksi	CMTT	RT	CTCM	CTCM	BC	CTCM	CTCM	RT	CTCM	BC	RT	CMTT	BC	RT	CMTT	CTCM	CMTT	CTCM

No	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota																		
		Sektor/Sub-sektor	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
IX	Jasa-Jasa	CMTT	CMTT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	CMTT	RT	RT	CTCM	CMTT	RT	BC	CMTT	CMTT	RT	BC
	a. Pemerintahan Umum	CTCM	CTCM	CMTT	RT	BC	RT	CMTT	CTCM	CMTT	CMTT	RT	CTCM	RT	RT	CMTT	CTCM	CMTT	RT	BC
	b. Swasta	RT	BC	CTCM	BC	RT	RT	CTCM	RT	RT	RT	RT	CTCM	CMTT	BC	RT	BC	RT	BC	BC
	9b.1. Jasa sosial kemasyarakatan	RT	BC	BC	RT	CMTT	RT	RT	RT	RT	RT	BC	CMTT	CTCM	RT	RT	CTCM	CTCM	RT	BC
	9b.2. Jasa hiburan dan kebudayaan	CTCM	BC	CTCM	RT	BC	RT	CMTT	BC	RT	RT	BC	CMTT	BC	CMTT	CMTT	CMTT	CMTT	RT	CMTT
	9b.3. Jasa perorangan dan rumah tangga	RT	RT	CTCM	RT	RT	RT	BC	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT

- |                       |                       |                      |                       |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 01 = Kab. Pacitan     | 11 = Kab. Bondowoso   | 21 = Kab. Ngawi      | 31 = Kota Blitar      |
| 02 = Kab. Ponorogo    | 12 = Kab. Situbondo   | 22 = Kab. Bojonegoro | 32 = Kota Malang      |
| 03 = Kab. Trenggalek  | 13 = Kab. Probolinggo | 23 = Kab. Tuban      | 33 = Kota Probolinggo |
| 04 = Kab. Tulungagung | 14 = Kab. Pasuruan    | 24 = Kab. Lamongan   | 34 = Kota Pasuruan    |
| 05 = Kab. Blitar      | 15 = Kab. Sidoarjo    | 25 = Kab. Gresik     | 35 = Kota Mojokerto   |
| 06 = Kab. Kediri      | 16 = Kab. Mojokerto   | 26 = Kab. Bangkalan  | 36 = Kota Madiun      |
| 07 = Kab. Malang      | 17 = Kab. Jombang     | 27 = Kab. Sampang    | 37 = Kota Surabaya    |
| 08 = Kab. Lumajang    | 18 = Kab. Nganjuk     | 28 = Kab. Pamekasan  | 38 = Kota Batu        |
| 09 = Kab. Jember      | 19 = Kab. Madiun      | 29 = Kab. Sumenep    |                       |
| 10 = Kab. Banyuwangi  | 20 = Kab. Magetan     | 30 = Kota Kediri     |                       |

Dari hasil analisis Overlay akan terdapat empat kemungkinan kriteria potensi masing-masing sektor dan sub sektor ekonomi pada tiap kabupaten/kota, empat kriteria kinerja tersebut yaitu: 1) Cepat Maju Cepat Tumbuh (CMCT), 2) Cepat Maju Tapi Tertekan (CMTT), 3) Berkembang Cepat (BC), dan 4) Relatif Tertinggal (RT).

Sub sektor yang mempunyai tipologi "cepat maju cepat tumbuh" mencerminkan bahwa sub sektor tersebut selain memberikan kontribusi yang tinggi, juga mengalami pertumbuhan yang tinggi. Sedangkan sub sektor yang bertipologi "cepat maju tapi tertekan" bisa diinterpretasikan bahwa sektor tersebut hanya memberikan kontribusi yang tinggi, namun tingkat pertumbuhannya sudah mulai menurun. Dengan kata lain sektor ini sudah mulai mengalami tingkat pertumbuhan jenuh.

Sementara untuk sub sektor yang bertipologi "berkembang cepat" bisa diartikan bahwa sub sektor tersebut memberikan kontribusi rendah, namun pertumbuhannya cepat, sub sektor yang mempunyai tipologi seperti ini biasanya menjadi sub sektor andalan di masa yang akan datang. Sedangkan sub sektor yang bertipologi "relatif tertinggal" merupakan sub sektor yang secara kontribusi maupun pertumbuhannya rendah. Sub sektor dengan tipologi ini memerlukan penanganan dan kebijakan khusus untuk meningkatkan kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi di suatu daerah.

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa daerah yang paling banyak mempunyai sub sektor dengan tipologi "cepat maju cepat tumbuh" adalah Kota Blitar, kemudian disusul oleh Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Tulungagung. Sedangkan daerah yang paling banyak mempunyai sub sektor dengan tipologi "relatif tertinggal" adalah Kabupaten Situbondo, kemudian disusul Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Banyuwangi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan :

1. Masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur mempunyai sektor unggulan sesuai dengan

potensi masing-masing daerah. Sektor-sektor tersebut dikatakan sektor unggulan karena pertumbuhan sektor-sektor tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di Jawa Timur sebagai daerah referensi.

2. Berdasarkan pada hasil analisis potensi ekonomi menunjukkan bahwa Kota Blitar merupakan daerah yang paling banyak mempunyai sub sektor ekonomi potensi atau dengan tipologi "cepat tumbuh cepat maju". Kota Blitar mempunyai 9 (sembilan) sub sektor dengan tipologi "cepat tumbuh cepat maju", sembilan sub sektor tersebut antara lain: 1) peternakan; 2) angkutan rel; 3) jasa penunjang angkutan; 4) pos dan telekomunikasi; 5) bank; 6) jasa perusahaan; 7) pemerintah umum; 8) swasta; dan 9) jasa sosial kemasyarakatan.

### **Saran**

1. Daerah yang termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat karena memiliki tingkat pertumbuhan PDRB rata-rata di atas Jawa Timur, sebaiknya lebih memprioritaskan program perencanaan daerah pada peningkatan pendapatan perkapitanya. Demikian pula bagi daerah yang termasuk dalam daerah maju tapi tertekan agar lebih memprioritaskan program perencanaan daerahnya pada pertumbuhan PDRB rata-rata.
2. Dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan pengembangan sektoral perekonomian daerah, hendaknya lebih memprioritaskan sektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota. Meskipun demikian sektor lainnya tetap mendapat perhatian secara proporsional sesuai dengan potensi dan peluang pengembangannya. Pengembangan sektor unggulan memerlukan adanya suatu program kebijakan yang dapat menjembatani dan memfasilitasi bergeraknya kegiatan sektor unggulan tersebut terus tumbuh berkembang.

### **Ucapan terimakasih**

Puji syukur kehadiran Allah s.w.t karena atas rahmatNya, penelitian ini dapat terselesaikan tanpa ada kendala satupun. Penelitian dengan judul Penentuan Leading Sektor Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur ini dapat berhasil

karena adanya bantuan beberapa pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ucapkan rasa terimakasih yang sedalamdalamnya kepada :

1. Para staf BPS Kabupaten Kabupaten/Kota Se Jawa Timur yang telah membantu penyediaan data-data untuk penelitian ini.
2. Adik-adik mahasiswa yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pengumpulan dan tabulasi data penelitian serta yang telah membantu dalam pengarsipan terkait administrasi.
3. Dosen-dosen jurusan ilmu Ekonomi dan studi pembangunan yang telah membantu dalam mengembangkan pemikirannya dalam analisis data.

Hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi sempurnanya penelitian ini. Akhirnya, peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya Pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya pemerataan pembangunan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, Lincoln, 1999, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta, bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Boediono, 1990, Ekonomi Moneter, seri Sinopsis, pengantar ilmu Ekonomi, Yogyakarta, BPFE
- Boediono, 1982, Teori pertumbuhan Ekonomi, seri Sinopsis pengantar Ilmu Ekonomi, Yogyakarta, BPFE.
- Dumairy, 1999, Perekonomian Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 1999, Pembangunan Regional di Indonesia Beberapa Catatan Menjelang Abad ke 21, Unisia, No 31/XVI/III/I 1996, Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2000, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, Yogyakarta UPP AMP YKPN
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, Otonomi & Pembangunan daerah, Yogyakarta, Erlangga
- Purnomo, Aprilyanto Dwi, Identifikasi Potensi Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 1994-1998, Tesis dipublikasikan, Yogyakarta : Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah mada Yogyakarta
- Sukirno, Sadono, 1976, Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah, Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sjafrizal, 1997, Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, Prisma, No 3 Maret
- Tambunan, Tulus, 1996, Tingkat dan Pertumbuhan PDRB Serta Kontribusi Sektor di Kawasan Indonesia Timur : Suatu Analisis Empiris, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Volume IV (2) ISSN X 27-55
- Utomo Imam, Jawa Timur menyongsong 2010: Pandangan, Harapan, dan Menjawab Tantangan Ke Depan
- Undang-undang RI No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah, Citra Umbara, Bandung.
- Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Citra Umbara, Bandung.
- Wijaya, Farid, 1992, Kompendium Ekonomika: Ekonomika pertumbuhan dan internasional, Yogyakarta, BPFE
- Yusuf Maulana, 1999, Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Sebagai Salah Satu Alat Analisis Alternatif Dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Volume XI, VII No 2 219-233